



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

2024

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanNya sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan terkait.

Dokumen Rencanan Kerja (RENJA) merupakan bahan pertimbangan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan juga sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas bagi setiap instansi untuk mencapai visi dan misi.

Dokumen Rencanan Kerja (RENJA) ini selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan RKPD untuk tahun-tahun mendatang, sehinggadiharapkan dari tahun ketahun akan dapat mencapai peningkatan kinerja yang menunjukkan keberhasilan dan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua.

Jayapura, Februari 2024

**PLT. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI PAPUA**



**MUSA ISLE, S.Sos., MPA.
PEMBAINA UTAMA MADYA
NIP. 19660616 1996610 1 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2023	26
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	26
2.4. Review Terhadap Awal RKPD 2023	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	31
3.2. Rencana Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Papua Tahun 2024	35
3.3. Review RKPD Provinsi Papua Tahun 2024	38
BAB IV PENUTUP.....	40
LAMPIRAN 1 MATRIKS RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024	
LAMPIRAN 2 MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel. 2.1 Realisasi Keuangan dan Relisasi Fisik Tahun 2023	07
Tabel. 2.2 Matriks Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua T. A 2023	17
Tabel. 2.3 Analisis Kinerja Tahun 2023	26
Tabel. 2.4 Prioritas Nasional 2023 dan Prioritas Daerah Provinsi Papua Tahun 2023.....	29
Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2023	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan,

dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua adalah :

- 1) Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 21) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
- 22) Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2020 tentang RENSTRA BNPB 2020 – 2024;
- 23) Peraturan Gubernur Papua No.51 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2023;
- 24) Peraturan Gubernur Papua No.36 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Satuan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program kegiatan-kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan Laporan Renja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.

BAB II EVALUASI KINERJA SATPOL PP dan PBD

Pada BAB II ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2023, analisis kinerja tahun 2023, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2023, serta review terhadap RKPD Provinsi Papua Tahun 2023.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III ini berisi tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana (PBD) Provinsi Papua Tahun 2024, Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Papua Tahun 2023, serta berisi review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI PAPUA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2023.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selama tahun 2023 dan perkiraan target Dinas Satpol PP dan BPBD tahun 2024.

B. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja. kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang ditetapkan

C. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua pada tahun 2023 telah melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.329.753.918.00,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan

Ratus Delapan Belas Rupiah). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 30.565.038.884.00,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan puluh Empat Rupiah) dengan capaian kinerja fisik sebesar 90,7% dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,03%.

Adapun rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGA N (%)	REALISAS I FISIK (%)
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	85,48	87,63
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,94	100
	b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD	99,59	100
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	99,59	100
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,75	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,71	100
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,7	100
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99,77	100
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,92	100
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99,92	100
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,87	97,4
	a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,44	100
	b. Penyediaan Peralatan dan	26,47	38,79

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGA N (%)	REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4
	Perlengkapan Kantor		
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,99	100
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100
	f. Penyediaan Bahan/Material	100	100
	g. Fasilitasi Kunjungan Tamu	99,99	100
	h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,99	100
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0
	a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	0	0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,63	100
	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	73,76	100
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,07	100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,69	100
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94,58	100
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,33	100
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99,59	100,00
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah	99,76	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGA N (%)	REALISAS I FISIK (%)
1	2	3	4
	Provinsi		
	a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100	100
	b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	97,59	100
	c. Koordinasi penyelenggara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi.	99,99	100
	d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99,96	100
	2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	99,06	100
	a. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur.	97,62	100
	b. Pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100	100
III.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	99,96	100
	1. Pelayanan informasi rawan bencana provinsi	99,99	100
	a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (per jenis bencana)	99,83	
	b. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	99,95	100
	c. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	100	100
	2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,90	100
	a. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi korban Bencana	99,72	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGA N (%)	REALISAS I FISIK (%)
1	2	3	4
	3. Penataan system dasar penanggulangan bencana	98,89	100
	a. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.	99,99	100
	b. Pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/ kota di wilayah provinsi.	100	100
	c. Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	100	100
	d. Penanganan pasca bencana provinsi	99,94	100
IV.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELATAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	99,99	100,00
	1. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran.	99,99	100
	a. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,99	100
Rata – Rata Realisasi Capaian Kegiatan		89,03	90,70

Sumber : Laporan TP2K Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2023

D. Urusan Administrasi Pemerintahan

Selama tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua telah melaksanakan program sebanyak 4 program. kegiatan sebanyak 13 dan 37 Sub Kegiatan. Dengan realisasi kinerja sebesar 90,70%.

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 dokumen dari target 7 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD

Tersedianya dokumen RKA - SKPD sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan perbahan RKA - SKPD

Tersedianya dokumen perubahan RKA - SKPD sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Tersedianya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebanyak 3 laporan dari target 3 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

(2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN untuk 138 orang dari target 138 orang dengan realisasi kinerja 100%.

b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran

Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran sebanyak 2 laporan dari target 2 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

(3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi

Tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih yaitu sebanyak 6 orang dengan target 6 orang dengan realisasi kinerja 100%.

(4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 2 paket komponen dari target 2 paket komponen dengan realisasi kinerja 100%.

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket dari target 2 paket dengan realisasi kinerja 50%.

c. Penyediaan bahan logistik kantor

Termobilisasinya beras ASN selama 12 bulan dari target 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan sebanyak 6 paket dari target sebanyak 6 paket dengan realisasi kinerja 100%.

e. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya koran dan bahan bacaan lainnya sebanyak 12 dokumen dari target 12 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

f. Penyediaan bahan/ material.

Tersedia 2 paket bahan/ material yaitu Alat Tulis Kantor dan peralatan kebersihan kantor dari target 2 paket bahan/ material, sehingga realisasi kinerjanya 100%.

g. Fasilitasi kunjungan tamu

Tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu dan makan minum satgas selama 12 bulan untuk target 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar provinsi ataupun dalam provinsi bagi 69 orang dari target 69 orang dengan realisasi kinerja 100%.

(5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Pengadaan kendaraan dinas operasional

Tidak terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Pemadam Kebakaran) dari target 2 unit, dikarenakan singkatnya waktu pelaksanaan pengadaan sehingga mengakibatkan realisasi menjadi 0%

- (6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Tersedianya anggaran untuk pembayaran penggunaan air, listrik, dan komunikasi untuk 12 bulan dari target 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan 2 paket dari target 2 paket dengan realisasi kinerja 100%
- (7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas.
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 sebanyak 26 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 14 unit dari kendaraan roda 2 sebanyak 26 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 14 unit dengan realisasi kinerja 100%.
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan.
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan roda 4 sebanyak 11 unit dan kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit dari kendaraan roda 4 sebanyak 11 unit dan kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit dengan realisasi kinerja 100%.
 - c. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor pada 2 kantor dengan target 2 kantor, dengan realisasi kinerja 100%.

2). Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1). Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
Terlaksananya 4 kegiatan pencegahan gangguan trantibum-linmas dari target 4 kegiatan dengan realisasi kinerja 100%.

b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Terlaksananya 2 kegiatan penindakan atas gangguan trantibumlinmas yaitu penertiban aset dan pengendalian unjuk rasa dari target 2 kegiatan tersebut, dengan realisasi kinerja 100%.

c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi.

Terlaksana 3 kegiatan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi dari target 3 kegiatan tersebut, dengan realisasi kinerja 100%.

d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.

Terlaksananya pelatihan bagi tenaga Satlinmas sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan tenaga Satlinmas yang ada dengan realisasi kinerja 100%.

(2). Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur

a. Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Gubernur.

Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Gubernur dari target 1 kegiatan sosialisasi dengan realisasi kinerja 100%.

b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur.

Terlaksana 1 kegiatan pengawasan yang di lakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur dari target 1 kegiatan dengan realisasi 100%.

3). Program Penanggulangan Bencana

(1). Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.

a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) Rawan bencana Provinsi (per jenis bencana).

Tersedianya jumlah orang yang tersedia melaksanakan sosialisasi KIE Rawan bencana (perjenis bencana) lintas kabupaten/kota sebanyak 40 orang dari target 40 orang dengan realisasi kinerja 100%.

(2). Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Tersedianya jumlah warga Negara (orang) yang bersedia termasuk kelompok rentang dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuannya dan keterampilan dalam pencegahan dan mitigasi bencana sebanyak 60 orang dari target 60 orang dengan realisasi kinerja 100%.

b. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana.

Tersedianya jumlah personil TCR tingkat provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana sebanyak 50 orang dari target 50 orang dengan realisasi kinerja 100%.

(3). Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Tersedianya distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana untuk jumlah korban bencana sebanyak 500 orang dari target 500 orang dengan realisasi kinerja 100%.

(4). Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

a. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.

Tersedianya dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat, dan pasca bencana) sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kab/Kota wilayah Provinsi

Tersedianya jumlah laporan hasil Biswas penyelenggaraan penanggulangan bencana sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

c. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

Tersedianya jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam sebanyak 60 keluarga dari target 60 keluarga dengan realisasi kinerja 100%.

d. Penanganan Pasca Bencana Provinsi.

Tersedianya jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang disusun sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

4). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

(1). Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

a. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamat provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

Tabel 2.2
Matriks Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua
T.A 2023

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Input : dana	Rp.	98.229.760	98.175.000	99,94	
		• Output : Tersedianya jumlah Dokumen perangkat daerah	Dokumen	7	7	100,00	
		• Outcome: jumlah Dokumen	Dokumen	7	7	100,00	
	2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	• Input : dana	Rp.	13.630.190	13.574.000	99,59	
		• Output : Tersedianya jumlah Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	• Output : Tersedianya jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	1	1	100,00	
		• Outcome: jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	1	1	100,00	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Input : dana	Rp.	68.286.400	68.117.100	99,75	
		• Output : Tersedianya jumlah Dokumen	Laporan	3	3	100,00	
		• Outcome: jumlah Dokumen	Laporan	1	1	100,00	
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	• Input : dana	Rp.	16.875.185.80	16.486.624.61	97,70		
	• Output : Tersedianya Jumlah Gaji yang dibayarkan	Orang	0	8	100,00		
	• Outcome: jumlah Gaji yang dibayarkan	orang	138	138	100,00		
				138	138		

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun • Outcome: jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun 	Rp. Laporan Laporan	37.945.900 1 1	37.945.000 1 1	100,00 100,00 100,00	
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Laporan keuangan semester. • Outcome: Jumlah dokumen laporan keuangan semester. 	Rp. Laporan Laporan	31.072.450 2 2	31.000.000 2 2	99,77 100,00 100,00	
	8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah pegawai yang mengikuti latihan • Outcome: jumlah pegawai yang mengikuti latihan 	Rp. Orang Orang	351.000.000 6 6	350.730.000 6 6	99,92 100,00 100,00	
	9. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah alat kelengkapan listrik dan yang disediakan • Outcome: Jumlah alat kelengkapan listrik dan yang disediakan 	Rp. Paket Paket	7.441.400 2 2	7.400.000 2 2	99,44 100,00 100,00	
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : tersedianya jumlah perlengkapan kantor yang disediakan. • Outcome: jumlah perlengkapan kantor yang disediakan. 	Rp. paket paket	136.000.000 2 2	36.000.000 1 1	26,47 50,00 50,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<ul style="list-style-type: none"> Input : dana Output : Tersedianya jumlah operasional pengantaran Beras Pegawai Outcome: jumlah operasional pengantaran beras pegawai 	Rp. Bulan	12.000.000 12	12.000.000 12	100,00 100,00	
			Bulan	12 12	12 12	100,00	
	12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> Input : dana Output : Tersedianya penyediaan barang cetakan dan pengadaan Outcome: penyediaan barang cetakan dan pengadaan 	Rp. paket	127.800.000 6	127.000.000 6	99,99 100,00	
			paket	6 6	6 6	100,00	
	13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Input : dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome: jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 	Rp. Dokumen	21.000.000 12	21.000.000 12	100,00 100,00	
		Frekuensi berlangganan	Dokumen	12 12	12 12	100,00	
	14. Penyediaan Bahan Material	<ul style="list-style-type: none"> Input : dana Output : Tersedianya jumlah Jenis ATK yang disediakan. Tersedianya jumlah jenis bahan dan alat kebersihan Outcome: jumlah jenis ATK yang disediakan. Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan 	Rp. paket	150.000.000 2	150.000.000 2	100,00 100,00	
			paket	2 2	2 2	100,00	
	15. Fasilitasi Kunjungan Tamu	<ul style="list-style-type: none"> Input : dana Output : Tersedianya makanan dan 	Rp. Laporan	860.000.000 2	859.905.000 2	99,99 100,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
		<ul style="list-style-type: none"> minuman dinas • Outcome: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu. 	Laporan	2	2	100,00	
	16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya pakaian dinas peserta. • Outcome: memperlancar tugas aparatur. 	Rp. Laporan laporan	1.892.000.000 69 69	1.891.855.710 69 69	99,99 100,00 100,00	
	17. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional lapangan • Outcome: jumlah kendaraan dinas lapangan 	Rp. Unit Unit	3.110.000.000 2 2	0 0 0	0,00 0,00 0,00	
	18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah jasa layanan • Outcome: jumlah jasa layanan 	Rp. Bulan Bulan	421.099.000 12 12	310.588.849 12 12	73,76 100,00 100,00	
	19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah jasa layanan • Outcome: jumlah jasa layanan 	Rp. Laporan laporan	105.620.000 1 1	103.580.000 1 1	98,07 100,00 100,00	
	20. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah motor yang terpelihara, tersedianya jumlah mobil pejabat yang terpelihara. • Outcome: jumlah motor yang terpelihara dan jumlah mobil pejabat yang terpelihara. 	Rp. unit unit	529.937.350 40 40	501.232.350 40 40	94,58 100,00 100,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan. • Outcome: jumlah motor dan mobil pejabat yang terpelihara 	Rp. Unit	794.937.350 21	789.379.000 21	99,33 100,00	
			Unit	21	21	100,00	
	22. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah gedung kantor • Outcome: jumlah gedung kantor 	Rp. Unit	150.000.000 2	150.000.000 2	100,00 100,00	
			Unit	2	2	100,00	
II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah patroli wilayah yang dilakukan Tersedianya jumlah pengamanan dan Pengawasan protokoler KDH/Pejabat Penting • Outcome: jumlah Patroli wilayah yang dilakukan Jumlah pengamanan dan pengawasan protokoler KDH/Pejabat Penting 	Rp. Kegiatan	451.605.000 4	451.605.000 4	100,00 100,00	
			Kegiatan	4	4	100,00	
	2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Terlaksananya jumlah pengendalian unjuk rasa dan penertiban Aset yang dilakukan • Outcome: Tersedia tim Pengendalian unjuk rasa dan penertiban asset 	Rp. Kegiatan	298.950.000 2	291.736.000 2	97,59 100,00	
			Kegiatan	2	2	100,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
		pemerintah Provinsi Papua					
	3. Kordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah pemberdayaan Satlinmas dalam pengamanan Masyarakat tingkat provinsi • Outcome: jumlah dokumentasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi. 	Rp. Dokumen Dokumen	2.093.901.300 3 3	2.093.639.965 3 3	99,99 100,00 100,00	
	4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Input : Dana • Output : tersedianya jumlah dokumenkoordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum. • Outcome : jumlah laporan yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum. 	Rp Laporan Laporan	275.748.700 1 1	275.646.720 1 1	99,99 100,00 100,00	
	5. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya laporan penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur • Outcome: jumlah hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan dan peraturan Gubernur. 	Rp. Laporan Laporan	350.000.000 1 1	341.683.350 1 1	97,62 100,00 100,00	
	6. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : tersedia laporan pelaksanaan 	Rp. Laporan	654.700.000 1	653.556.550 1	99,83 100,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	peraturan daerah dan peraturan Gubernur.	peraturan daerah dan peraturan Gubernur. <ul style="list-style-type: none"> • Outcome: jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur. 	Laporan	1	1	100,00	
III. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana provinsi (per jenis bencana)	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (per jenis bencana). • Outcome: jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana) lintas kabupaten kota. 	Rp. Orang	1.100.000.000 40	1.099.917.357 40	99,99 100,00	
			orang	40	40	100,00	
	2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah orang yang mengikuti pelatihan pecegahan dan mitigasi bencana. • Outcome: jumlah warga Negara termaksud kelompok rentang dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas kabupaten /kota yang meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pencegahan dan mitigasi bencana. 	Rp. Orang	200.000.000 60	199.900.001 60	99,95 100,00	
			Orang	60	60	100,00	
	3. Pengembangan kapasitas Tim reaksi cepat (TRC)	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya Tim reaksi 	Rp. Orang	300.500.000 50	300.500.000 50	100,00 100,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	Bencana	cepat (TRC) • Outcome: jumlah Tim reaksi cepat (TRC) yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	50	50	100,00	
	4. Penyediaan logistik penyelamatan dan Evakuasi korban bencana.	• Input : dana • Output : Tersedianya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Outcome: jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Rp. Orang Orang	1.000.000.000 500 500	998.982.409 500 500	99,90 100,00 100,00	
	5. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.	• Input : dana • Output : Tersedianya dokumen kerjasama antar lembaga kemitraan dalam PB. • Outcome: jumlah dokumen kerjasama antar lembaga kemitraan dalam penyelenggaraan PB di seluruh tahapan (pra, saat dan pasca bencana)	Rp. Kabupaten Kabupaten	218.553.350 1 1	218.532.100 1 1	99,99 100,00 100,00	
	6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	• Input : dana • Output : Tersedianya jumlah laporan hasil Binwas penyelenggaraan penanggulangan. • Outcome: jumlah laporan hasil Binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Rp. Laporan Laporan	350.000.000 1 1	349.947.610 1 1	99,99 100,00 100,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTAS E PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	7. Pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam. • Outcome: jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam. 	Rp. Keluarga	200.000.000 60	200.000.000 60	100,00 100,00	
	8. Penanganan pasca bencana provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : tersedianya jumlah kabupaten/kota yang di pantau • Outcome : jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca (R3P) yang disusun. 	Rp. Dokumen	531.512.768 2	531.209.668 2	99,94 100,00	
IV. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Input : dana • Output : Tersedianya jumlah peraturan daerah yang disusun Tersedianya jumlah personil dan Tersedianya Operasional Damkar • Outcome: jumlah laporan hasil pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsidan kabupaten/kota. 	Rp. Laporan	500.000.000 1	499.952.527 1	99,99 100,00	
				34.329.753.918	30.565.038.884	89,69	

Sumber :Laporan TP2K Satpol PP &PBD Provinsi Papua Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2023.

Tingkat capaian kinerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua tahun 2023 digambarkan dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2023. Jumlah program dalam rencana kerja tahun 2023 sebanyak 4 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 37 sub kegiatan. Dapat dikemukakan capaian kinerja program tahun 2023 mencapai 96,46%. Sedangkan capaian outcome sasaran strategis berdasarkan capaian keuangan adalah sebesar 96,90%

Tabel 2.3
Analisis Kinerja Tahun 2023

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Keuangan(%)	Realisasi Fisik (%)	Bobot (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22	86,29	87,63	75,17
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	99,59	100	12,02
3.	Program Penanggulangan Bencana	8	99,96	100	11,36
4.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	99,99	100	1,46
Capaian Outcome sasaran strategis tahun 2023 berdasarkan capaian 4 Program yang terdiri dari 37 Kegiatan			96,46	96,90	100

Sumber : LAKIP Satpol PP & PBD Provinsi Papua, Tahun 2023.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah merubah pola perencanaan, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Dan PBD Provinsi Papua tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat. Adapun isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan PBD Provinsi Papua dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah sesuai target dan sasaran sebagaimana tertuang dalam renja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua. Adapun faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya peralatan yang dimiliki oleh Satpol PP dan PBD Provinsi Papua.
2. Tersedianya peralatan teknologi yang modern seperti komputer beserta program internet sehingga data dan informasi dapat diakses.
3. Tersedianya tenaga aparatur yang cukup.
4. Tersedianya dana rutin (belanja tidak langsung) maupun pembangunan (belanja langsung), walaupun masih sangat minim.
5. Keberadaan kelembagaan pers (media elektronik dan cetak) seperti: koran Harian Cenderawasih Pos, RRI, TVRI, Top TV Papua dalam menginformasikan/ menyebarluaskan pembangunan dan kebijakan strategis Pemerintah yang telah dilakukan oleh Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

B. Kegagalan

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya regulasi operasional penyelenggaraan Penanggulangan Bencana trantibumlinmas (berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Bencana, Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana, Organisasi dan Tata Kerja, dll).
2. Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan regulasi belum maksimal.
3. Masih menyesuaikan diri terhadap penggabungan 2 SKPD yang berbeda tugas pokok dan fungsinya.
4. Lemahnya pengendalian terhadap laporan pertanggungjawaban.
5. Masih minimnya dana yang di peruntukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Provinsi Papua.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Melihat pada faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP dan PBD Provinsi Papua melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis.
2. Melakukan perbaikan mutu pelayanan.
3. Semakin memperkuat koordinasi internal kantor Satpol PP dan PBD Provinsi Papua agar mampu mensinergikan kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang di emban.
4. Melakukan kerjasama dengan Instansi Teknis terkait di daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pencegahan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana.
5. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk perluasan jangkauan pelayanan.
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis.
7. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Teknis terkait melalui MOU.

2.4 Review Terhadap Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023 isu strategis yang menjadi dasar penentuan strategis dan arah kebijakan pembangunan provinsi papua untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan , dan gizi) baik dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah;
2. Pemantapan rasa aman dan suasana demokratis yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan;
3. Peningkatan arah kelola pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan public;
4. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik local didukung oleh pembangunan insfrastruktur yang memperhatikan prinsip pembanguna berkelanjutan;
5. Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan Kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

Arah kebijakan RKPD Papua 2023:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan Rendah karbon dan transisi energy;
7. Percepatan pembangunan insfrastruktur dasar;
8. Pembangunan IKN.

Kebijakan untuk masing-masing prioritas pembangunan adalah pada table 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Prioritas Nasional 2023 dan Prioritas Daerah Provinsi Papua Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Peningkatan akses kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan/ SDM.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM.	
2.	Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi.	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan Berkelanjutan.	
3.	Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan diluar sector tambang.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah.	
4.	Penguatan tata kelolah pemerintah dari kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi.	Peningkatan keamanan dan ketertiban.	
5.	Pemanfaatan infrastruktur dasar dan konektivitas teknologi dan informasi antar wilayah.	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan.	
6.	Mengoptimalkan tingkat kerentangan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.		

Sumber : Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Papua dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua sebagai fungsi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam pencegahan tindak kriminal, pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana sifatnya mendukung kegiatan prioritas tersebut yaitu kegiatan Trantibumlinmas dan penanggulangan bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang dirumuskan Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan Misi dan mencapai Visi berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- b. Mempercepat terwujudnya kemitraan dengan pemda Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- d. Meningkatkan relevansi dengan instansi teknis terkait dalam Penanganan Pasca Bencana.
- e. Mempercepat terpenuhinya pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- f. Mempercepat proses pengolahan data dan informasi Trantibumlinmas dan Penanggulangan Bencana.
- g. Mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas dan berkapsitas.
- h. Meningkatkan Kohesivitas Sosial Masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan sebagaimana dicantumkan dalam Renstra Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya cakupan wilayah pelayanan dan kualitas pelayanan bagi korban bencana.
- b. Terwujudnya kemitraan dengan Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pelaksanaan upaya-upaya pengurangan resiko bencana.
- c. Terciptanya relevansi dengan instansi teknis terkait dalam Penanganan bencana mulai dari Pra-bencana Saat-bencana dan Pasca-bencana.
- d. Terpenuhinya pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- e. Tersedianya data dan informasi Bencana secara akurat.
- f. Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- g. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan indikator kinerja setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2018 - 2023

MISI : 1. Memantapkan Rasa Aman, Tentram, dan Damai Serta Kehidupan Demokrasi Dalam Memperkuat NKRI		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatkan Kohesivitas Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perkada c. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Trantibum Tranmas Serta Linmas
MISI : 2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mewujudkan aparatur pemerintahan yang	1. Meningkatnya Pengawasan Internal Dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH

berintegritas dan berkapasitas	Pelaksanaan Kebijakan KDH	b. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kerja Pelayanan Internal dan Dukungan Teknis
MISI : 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Baik pada Masa Depan, Sebelum, Saat Terjadi, maupun Pasca Kejadian Bencana secara Efektif, Efisien, Terkoordinasi, Menyeluruh yang dilandasi oleh Prinsip Kemanusiaan, Kesetaraan dan Keadilan		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penanggulangan Bencana	1. Pengurangan Resiko Bencana (Pencegahan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. b. Terbentuknya regulasi daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Tersusunnya rencana penanggulangan bencana. d. Terpetakannya daerah rawan bencana. e. Terpasangnya rambu daerah rawan bencana.
	2. Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Kontijensi b. Tenaga terlatih. c. Relawan penanggulangan bencana. d. Terbentuknya desa tangguh e. Mitigasi terhadap ancaman bencana.
	3. Ketersediaan Buffer Stock Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya logistik bagi masyarakat korban bencana. b. Tersedianya jumlah dan jenis peralatan pendukung penanggulangan bencana. c. Terlaksananya pengelolaan logistik dalam penanggulangan bencana.
	4. Terlaksananya Penanganan : <ul style="list-style-type: none"> a. Siaga Darurat b. Tanggap Darurat c. Transisi Darurat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselamatkannya/ berkurangnya jumlah korban bencana. b. Terlayannya masyarakat korban bencana. c. Terlaksananya fungsi-fungsi sarana dan prasarana umum.
	5. Terlaksananya Rehabilitasi Pasca Bencana : <ul style="list-style-type: none"> a. Manusia b. Fasilitas Umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terrehabilitasinya masyarakat/manusia korban bencana. b. Terrehabilitasinya fasilitas umum.
	6. Terlaksananya Rekonstruksi Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya kembali fasilitas umum. b. Terbangunnya kembali rumah bagi masyarakat korban bencana.
MISI : 4. Mewujudkan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Didukung oleh Profesionalitas SDM, Logistik dan Peralatan.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mempercepat Proses Pengolahan Data dan	1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah surat menyurat. b. Persentase jumlah bacaan dan aturan perundangan.

Informasi Bencana		<ul style="list-style-type: none"> c. Persentase perawatan perlengkapan gedung kantor. d. Persentase perawatan gedung kantor. e. Persentase perawatan kendaraan dinas/operasional.
	2. Meningkatnya Kapasitas dan Kedisiplinan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat BPBD Provinsi Papua. b. Rata – rata kehadiran pegawai. c. Pelatihan/Bimtek yang dilakukan.
	3. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersusunnya buku pelaporan kinerja, keuangan, SOP, dan Renja.
	4. Meningkatnya Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peralatan penanggulangan bencana. b. Tersedianya logistik penanggulangan bencana.
MISI : 5. Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pengurangan Resiko Bencana		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima di Bidang Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersosialisasikannya kegiatan pengurangan resiko bencana.
MISI : 6. Melakukan Upaya Pertolongan dan Penyelamatan serta Merehabilitasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Meningkatkan Relevansi dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penanganan : 2. Siaga Darurat 3. Tanggap Darurat 4. Transisi Darurat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselamatkannya/berkurangnya jumlah korban bencana. b. Terlayannya masyarakat korban bencana. c. Terpulihkannya fungsi-fungsi sarana dan prasarana umum.
MISI : 7. Melakukan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mempercepat Terpenuhinya Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rehabilitasi Pasca Bencana bagi : 2. Manusia 3. Fasilitas Umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terrehabilitasinya masyarakat/manusia korban bencana. b. Terrehabilitasinya fasilitas umum.
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rekonstruksi Pasca Bencana bagi : 2. Manusia 3. Fasilitas Umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya kembali fasilitas umum pasca bencana. b. Terbangunnya kembali rumah masyarakat pasca bencana.
MISI : 8. Mewujudkan Penguatan Koordinasi dan Komitmen para Pemangku Kepentingan/ Stakeholder dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan		

1	2	3
Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
Mempercepat Terwujudnya Kemitraan dengan Pemerintah Kab./Kota dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya Koordinasi dan Komitmen BPBD se – Provinsi Papua	a. Koordinasi antar BPBD se-Provinsi Papua. b. Terlatihnya bendahara BPBD se-Provinsi Papua. c. Termonevnya program dan kegiatan BPBD se-Provinsi Papua.

Sumber : Renstra BPBD Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2024

Adapun secara umum Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua yang diusulkan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Kegiatan :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Penyediaan Bahan/Material.
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penanggulangan Bencana.

Kegiatan :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi.

Kegiatan :

- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana.
5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
6. Penyusunan Rencana Kontijensi.
7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
9. Pengelolaan Risiko Bencana.
10. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

Kegiatan :

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Sub Kegiatan :

1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana.
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
6. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi.

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi.

Kegiatan :

- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Sub Kegiatan :

1. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
2. Penanganan Pasca Bencana Provinsi.
3. Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kab/Kota.
4. Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Provinsi.
6. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi.
7. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
9. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah.
10. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.
11. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

3.3. Review RKPD Provinsi Papua Tahun 2024.

Penyusunan Renja BPBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Papua tahun 2024, dimana pada dokumen RKPD Provinsi Papua tahun 2024 ini berisi:

A. Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026

Adapun isu strategis Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi).
2. Kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan.

4. Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten.
5. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
6. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik lokal, didukung oleh pembangunan infrastruktur.

B. Arah kebijakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2024.

Dari isu strategis diatas kemudian dapat disusun arah kebijakan RKPD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
8. Pembangunan IKN.

C. Prioritas pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.

Setelah ditentukan arah kebijakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, maka kemudian ditentukan prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM.
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Percepatan Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah.
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Melihat dari prioritas pembangunan daerah provinsi Papua maka untuk BPBD Provinsi Papua masuk dalam Prioritas pembangunan No.3 yaitu percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2018 -2023.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selanjutnya.

Jayapura, Februari 2024

**PLT. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI PAPUA**


MUSA ICHN S.Sos., MPA.
PEMBAINA UTAMA MADYA
NIP. 19660616 1996610 1 002